



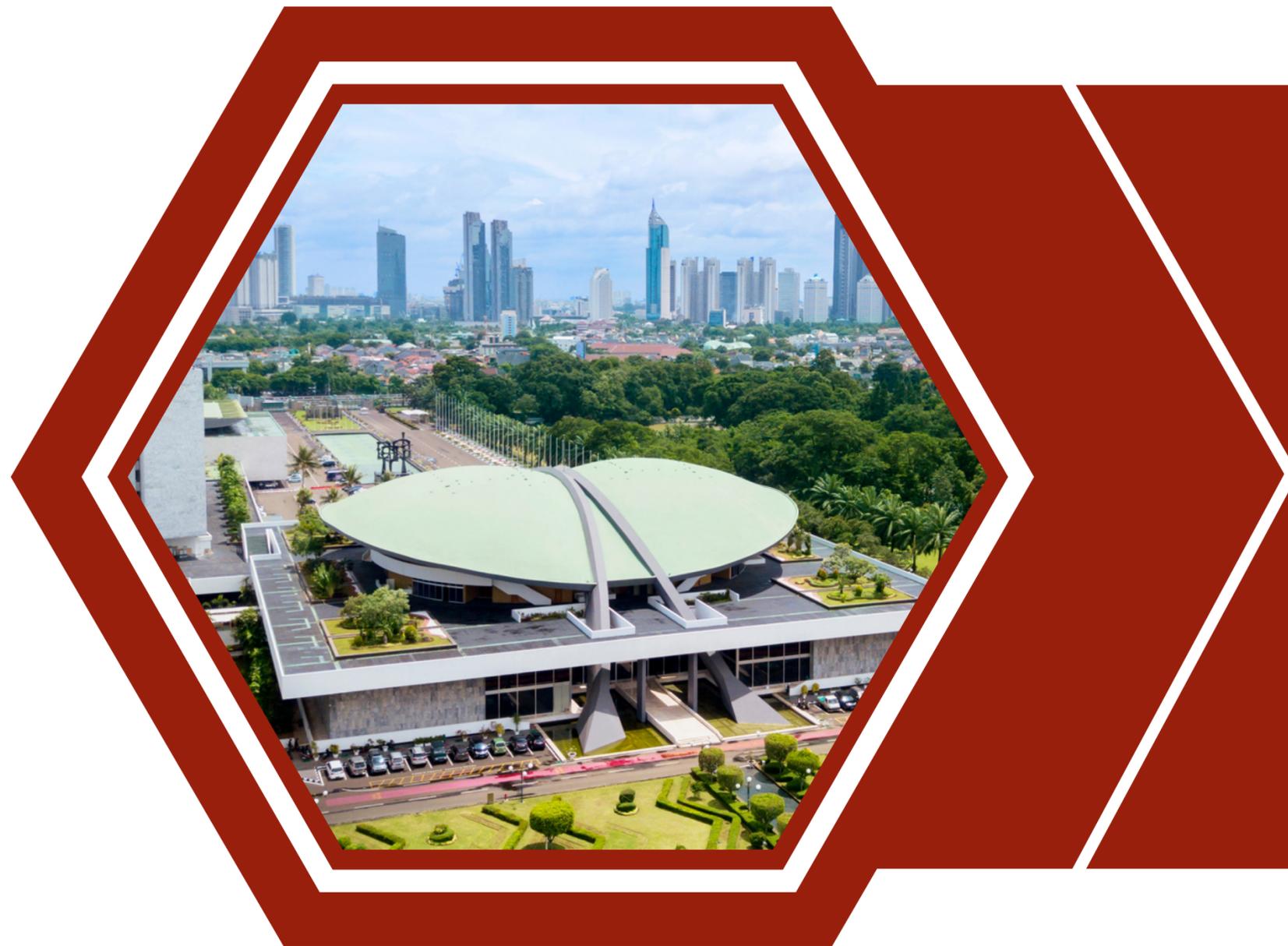
**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

# INFO LEGISLASI

**3 November 2023**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BIDANG POLITIK, HUKUM,  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAN**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN  
PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



**SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PUU BIDANG POLHUKHAM  
DAN PUSAT PUU BIDANG EKKUINBANGKESRA  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**Pengarah**

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)**

**Penanggungjawab**

**Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Bidang Polhukham Badan Keahlian DPR RI)**

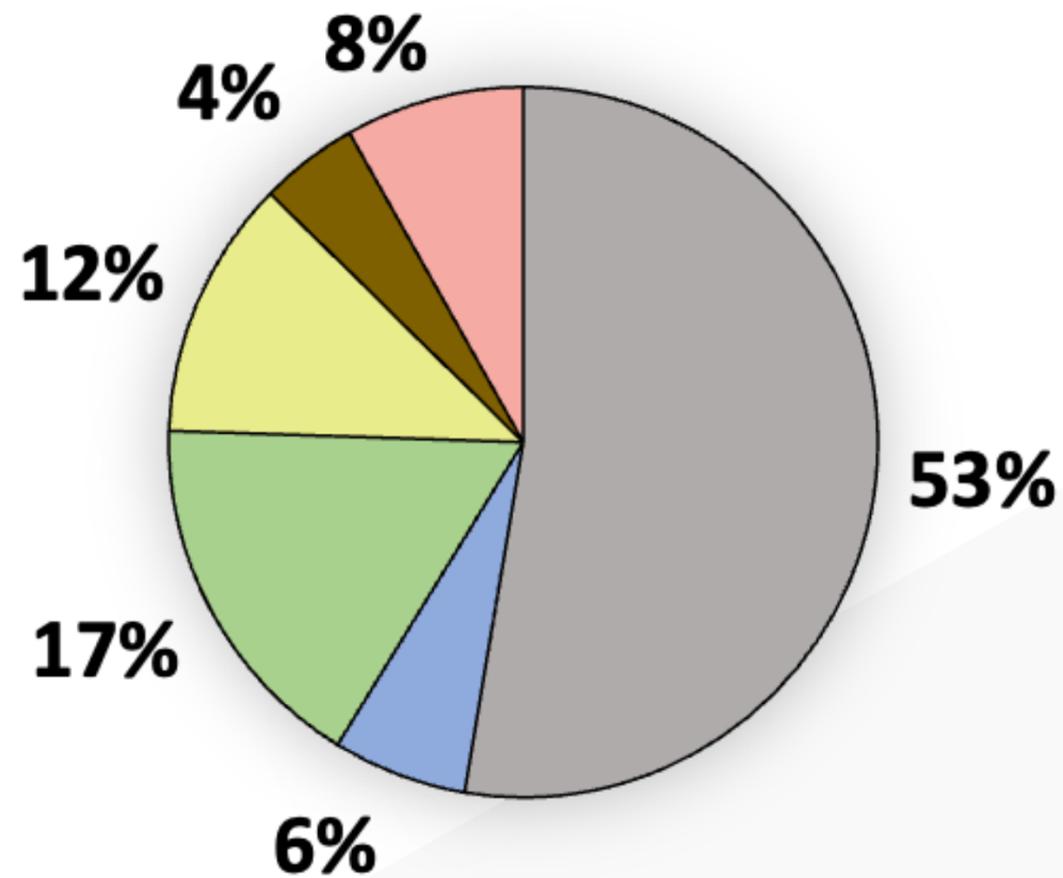
**Penanggungjawab**

**Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.  
(Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Bidang Ekkuinbangkesra Badan Keahlian DPR RI)**

**Tim Penyusun Info Legislasi Pusat PUU Bidang Polhukham  
dan Pusat PUU Bidang Ekkuinbangkesra**

# INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2023

## Keterangan:



■ **Penyusunan Pusat PUU: 129 RUU**

■ **Penyusunan AKD: 15 RUU**

■ **Harmonisasi: 41 RUU**

■ **Akan Memasuki Pembicaraan Tingkat I: 29 RUU**

■ **Pembicaraan Tingkat I: 11 RUU**

■ **Pembicaraan Tingkat II: 20 RUU**



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

# TAHAPAN PENYUSUNAN

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Makin meningkatnya kebutuhan akan dokter hewan di masyarakat.</li><li>2. Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pendidikan tinggi kedokteran hewan.</li><li>3. Pendidikan kedokteran hewan masih mengacu kepada UU tentang pendidikan tinggi pada umumnya.</li><li>4. Belum adanya pendidikan spesialis untuk kedokteran hewan.</li><li>5. Adanya perbedaan anatomi tubuh hewan dan manusia menjadi alasan dibutuhkannya fakultas kedokteran hewan sendiri yang berbeda dengan fakultas kedokteran.</li></ol>
2.	RUU tentang Permuseuman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih lemahnya manajemen pengelolaan museum sehingga pengelolaan museum belum terstandarisasi secara merata.</li><li>2. Permasalahan kelembagaan yang berperan dalam pembinaan museum dikarenakan perubahan struktur organisasi di Kemendikbudristek pada tahun 2019.</li><li>3. Kurangnya dukungan Pemerintah Pusat terutama dukungan anggaran terhadap museum yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat.</li><li>4. Sumber Daya Manusia museum di Indonesia belum memadai karena masih terbatasnya ketersediaan ahli di bidang terkait yang sangat spesifik.</li><li>5. Sarana dan prasarana serta sistem keamanan museum kurang memadai.</li><li>6. Masih rendahnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap museum.</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Anak Yatim Piatu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19.</li><li>2. Perlindungan anak serta pemenuhan hak dan tumbuh kembangnya.</li><li>3. Konsep pemerataan program bantuan bagi anak yatim dan/atau piatu.</li><li>4. Ketersediaan data anak yatim piatu yang masih beragam menyebabkan pemberian bantuan kurang optimal.</li></ol>
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kuota jemaah haji yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia. Pengaturan terkait presentase kuota tersebut yang diatur dalam undang-undang dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi penyelenggaraan ibadah haji yang dinamis.</li><li>2. Keterbatasan petugas dan sarana prasarana yang belum memadai dalam pelayanan ibadah haji di tanah suci.</li><li>3. Permasalahan manajemen pelayanan haji di Indonesia khususnya terkait pelaksanaan manasik haji.</li><li>4. Belum diakuinya visa haji mujamalah (haji furoda) sebagai visa haji kuota Indonesia sehingga masih terjadi permasalahan dalam aspek perlindungan dan pengawasan, serta pencatatan jumlah jemaah haji Indonesia.</li><li>5. Perlunya pengaturan terkait mekanisme pembatalan haji dalam kondisi tertentu (<i>force majeure</i>).</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia.</li><li>2. Minimnya keuntungan berupa royalti yang diperoleh bagi penulis.</li><li>3. Pajak penulis berupa pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan relatif tinggi.</li><li>4. Masih maraknya pembajakan buku termasuk pelanggaran hak cipta melalui penjualan buku di marketplace.</li><li>5. Krisisnya nomor terbit ISBN yang dapat mengancam arus kegiatan para pelaku percetakan buku.</li><li>6. Sulitnya buku akademik mendasarkan pasar.</li><li>7. Menurunnya produksi dan penjualan buku secara umum akibat pandemi Covid-19.</li><li>8. Permasalahan terkait transformasi buku fisik ke buku digital serta pengembangan buku digital/buku elektronik.</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Sentralisasi pengelolaan zakat, keberadaan lembaga pengelola zakat di masyarakat, dan persyaratan pendirian lembaga amil zakat (LAZ).</b></li><li>2. <b>Keberadaan BAZNAS sebagai operator dan regulator.</b></li><li>3. <b>Keberadaan lembaga <i>crowdfunding</i> yang belum diatur dalam UU.</b></li><li>4. <b>Implementasi pembayaran zakat yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan.</b></li><li>5. <b>Kewajiban zakat bagi badan usaha.</b></li></ol>
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf sebagai wakaf produktif.</b></li><li>2. <b>Belum optimalnya pengembangan wakaf uang.</b></li><li>3. <b>Pembinaan terhadap nazir agar memiliki kemampuan mengelola harta benda wakaf secara produktif.</b></li><li>4. <b>Sumber pembiayaan untuk mengelola harta benda wakaf.</b></li><li>5. <b>Ikrar wakaf melalui media elektronik/secara digital.</b></li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semakin maraknya perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>).</li><li>2. Perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar rakyat berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern.</li><li>3. Manajemen dan pengelolaan pasar yang belum maksimal.</li></ol>
9.	RUU tentang Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tol laut;</li><li>2. <i>Dwelling time</i> (tunggu angkut), <i>waiting time</i> (waktu kapal sandar), <i>demurrage</i> (batas waktu pemakaian peti kemas);</li><li>3. Infrastruktur pelabuhan;</li><li>4. Tanggung jawab syahbandar berkaitan keselamatan kapal;</li><li>5. Penjaga laut &amp; pantai (<i>sea &amp; coast guard</i>);</li><li>6. Tata cara penanganan kapal di pelabuhan; dan</li><li>7. Sinkronisasi KUHP baru.</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Risiko tokoh agama dalam penyampaian ajaran agamanya.</li><li>2. Pelindungan terhadap simbol agama agar tidak terjadi tindakan penodaan, penghinaan, perusakan, dan/atau pembakaran yang menyebabkan konflik.</li><li>3. Pengaturan mengenai pelindungan tokoh agama dan simbol agama masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.</li></ol>
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melengkapi peraturan terkait Sistem Informasi Manajemen Imigrasi.</li><li>2. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka belum terakomodir.</li><li>3. Permasalahan WNA yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian belum terselesaikan.</li><li>4. Akan membentuk Badan Nasional Keimigrasian (BNK).</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha.</li><li>2. Penegakan kedudukan, tugas dan kewenangan KPPU.</li><li>3. Penerapan <i>leniency program</i> dalam penanganan kartel.</li><li>4. Integrasi Perubahan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.</li></ol>
13.	RUU tentang Industri Strategis Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih belum jelasnya jenis komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori industri strategis perkebunan.</li><li>2. Belum jelasnya indikator apa saja yang termasuk di dalam penentuan komoditas industri strategis perkebunan.</li><li>3. Belum adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan industri perkebunan.</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
14.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai kewirausahaan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat parsial sehingga perlu pengaturan yang lebih komprehensif, terarah, sinergis, dan berkelanjutan dalam UU tersendiri guna menjamin kepastian hukum;</li><li>2. Persoalan <i>mindset</i> (cara berfikir) sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir mendapatkan pekerjaan setelah selesai sekolah/kuliah;</li><li>3. Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga;</li><li>4. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan wirausaha sulit untuk mengakses permodalan; dan</li><li>5. Regulasi yang tidak mendukung wirausaha dan belum adanya sistem informasi tentang kewirausahaan yang valid dan terintegrasi.</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
15.	RUU tentang Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsep energi bersih (<i>clean energy</i>) dan keberlanjutan energi (<i>sustainability energy</i>).</li><li>2. Pasokan listrik yang tidak merata antar daerah di Indonesia..</li><li>3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Memberikan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik..</li><li>4. Prinsip <i>unbundling</i> dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
16.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Sailan Darussalam	<p>Kabupaten Gunung Sailan Darussalam merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sedangkan Kabupaten Indragiri Utara dan Kabupaten Indragiri Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir. Secara geografis terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota kabupaten masing-masing. Sehingga upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien akibat rentang kendali yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut juga berdampak pada terhambatnya upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p>
17.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan	
18.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Utara	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
19.	RUU tentang Kota Bengkulu	
20.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan	
21.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara	
22.	RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong	
23.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir	
24.	RUU tentang Kota Palembang	
25.	RUU tentang Kabupaten Muara Enim	
26.	RUU tentang Kabupaten Lahat	
27.		

Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
28.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu	<p data-bbox="1492 964 3145 1159">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
29.	RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin	
30.	RUU tentang Kabupaten Musi Rawas	
31.	RUU tentang Kabupaten Jembrana	
32.	RUU tentang Kabupaten Buleleng	
33.	RUU tentang Kabupaten Tabanan	
34.	RUU tentang Kabupaten Klungkung	
35.	RUU tentang Kabupaten Karangasem	
36.	RUU tentang Kabupaten Badung	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
37.	RUU tentang Kabupaten Bangli	
38.	RUU tentang Kabupaten Gianyar	
39.	RUU tentang Kabupaten Lombok Barat	
40.	RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah	
41.	RUU tentang Kabupaten Lombok Timur	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
42.	RUU tentang Kabupaten Bima	
43.	RUU tentang Kabupaten Dompu	
44.	RUU tentang Kabupaten Sumbawa	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
45.	RUU tentang Kota Bengkulu	
46.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan	
47.	RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara	
48.	RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong	
49.	RUU tentang Kota Palembang	<p><b>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</b></p>
50.	RUU tentang Kabupaten Muara Enim	
51.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir	
52.	RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu	
53.	RUU tentang Kabupaten Lahat	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
54.	RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin	
55.	RUU tentang Kabupaten Musi Rawas	
56.	RUU tentang Kabupaten Jembrana	
57.	RUU tentang Kabupaten Buleleng	
58.	RUU tentang Kabupaten Tabanan	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
59.	RUU tentang Kabupaten Klungkung	
60.	RUU tentang Kabupaten Karangasem	
61.	RUU tentang Kabupaten Badung	
62.	RUU tentang Kabupaten Bangli	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
63.	RUU tentang Kabupaten Gianyar	<p data-bbox="1486 821 3025 1014">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
64.	RUU tentang Kabupaten Lombok Barat	
65.	RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah	
66.	RUU tentang Kabupaten Lombok Timur	
67.	RUU tentang Kabupaten Bima	
68.	RUU tentang Kabupaten Dompu	
69.	RUU tentang Kabupaten Sumbawa	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
70.	RUU tentang Kota Bandung	<p data-bbox="1486 817 3018 1084">Menyesuaikan dengan kondisi ketatanegaraan dan perundang-undangan di bidang Pemda yang diacu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum, serta Pemda saat ini.</p>
71.	RUU tentang Kabupaten Bandung	
72.	RUU tentang Kabupaten Sumedang	
73.	RUU tentang Kabupaten Ciamis	
74.	RUU tentang Kabupaten Garut	
75.	RUU tentang Kabupaten Tasikmalaya	
76.	RUU tentang Kabupaten Sukabumi	
77.	RUU tentang Kota Sukabumi	
78.	RUU tentang Kabupaten Cianjur	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
79.	RUU tentang Kota Cirebon	<p data-bbox="1486 821 3025 1084">Menyesuaikan dengan kondisi ketatanegaraan dan perundang-undangan di bidang Pemda yang diacu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum, serta Pemda saat ini.</p>
80.	RUU tentang Kabupaten Cirebon	
81.	RUU tentang Kabupaten Kuningan	
82.	RUU tentang Kota Bogor	
83.	RUU tentang Kabupaten Bekasi	
84.	RUU tentang Kabupaten Bogor	
85.	RUU tentang Kabupaten Indramayu	
86.	RUU tentang Kabupaten Majalengka	
87.	RUU tentang Kabupaten Karawang	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
88.	RUU tentang Kabupaten Lebak	<p data-bbox="1486 821 3025 1014">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
89.	RUU tentang Kabupaten Pandeglang	
90.	RUU tentang Kabupaten Bantul	
91.	RUU tentang Kabupaten Gunungkidul	
92.	RUU tentang Kabupaten Serang	
93.	RUU tentang Kabupaten Tangerang	
94.	RUU tentang Kabupaten Kulon Progo	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
95.	RUU tentang Kabupaten Sleman	<p data-bbox="1486 821 3025 1014">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
96.	RUU tentang Kota Yogyakarta	
97.	RUU tentang Kabupaten Banggai	
98.	RUU tentang Kabupaten Poso	
99.	RUU tentang Kabupaten Wajo	
100.	RUU tentang Kabupaten Sidenreng Rappang	
101.	RUU tentang Kabupaten Pinrang	
102.	RUU tentang Kabupaten Enrekang	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
103.	RUU tentang Kabupaten Luwu	<p data-bbox="1482 602 3015 799">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
104.	RUU tentang Kabupaten Tana Toraja	
105.	RUU tentang Kabupaten Majene	
106.	RUU tentang Kabupaten Mamuju	
107.	RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
108.	RUU tentang Kabupaten Jeneponto	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
109.	RUU tentang Kabupaten Takalar	
110.	RUU tentang Kabupaten Gowa	
111.	RUU tentang Kota Makassar	
112.	RUU tentang Kabupaten Maros	
113.	RUU tentang Kabupaten Pangkajene Kepulauan	
114.	RUU tentang Kabupaten Selayar	
115.	RUU tentang Kabupaten Bantaeng	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
116.	RUU tentang Kabupaten Donggala	<p data-bbox="1486 821 3025 1014">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
117.	RUU tentang Kabupaten Toli-Toli	
118.	RUU tentang Kabupaten Sinjai	
119.	RUU tentang Kabupaten Bone	
120.	RUU tentang Kabupaten Bulukumba	
121.	RUU tentang Kabupaten Barru	
122.	RUU tentang Kabupaten Soppeng	
123.	RUU tentang Kabupaten Pare-Pare	

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
124.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran (Provinsi Sumatera Utara)	Kabupaten Simalungun Hataran dibentuk karena pemekaran dengan Kabupaten Simalungun. RUU ini merupakan penugasan dari Ketua Komisi II DPR RI.
125.	RUU tentang Pembentukan Kota Duri (Pemekaran Kabupaten Bengkalis)	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1386 784 3035 896">1. Penetapan kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah Kota Duri.</li><li data-bbox="1386 915 3035 1028">2. Penentuan batas wilayah Kota Duri dengan daerah otonom lainnya.</li><li data-bbox="1386 1046 3035 1234">3. Pengalihan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset dan dokumen dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkalis) kepada Kota Duri.</li><li data-bbox="1386 1253 3035 1440">4. Pengaturan alokasi transfer ke daerah, hibah dan batuan dana dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkalis) dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Kota Duri.</li><li data-bbox="1386 1459 3035 1515">5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah baru Kota Duri.</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
126.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam (Pemekaran kabupaten Rokan Hulu)	<p>Secara geografis terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari Pasir Pangairan selaku ibu kota dari Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan menyulitkan pemerintah daerah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p>
127.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur	<p>Provinsi Sulawesi Timur lahir dari pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi. Terdapat beberapa kabupaten yang terletak jauh dari ibu kota, sehingga menyulitkan upaya untuk melayani masyarakat dan menghambat upaya untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
128.	RUU tentang Satu Data Indonesia (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)	<p>Mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk menyediakan data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakaikan bagi instansi Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan pembangunan, dan bagi lembaga legislatif dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.</p>
129.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan Putusan MK tersebut.</li><li>2. Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan.</li><li>3. PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi.</li><li>4. Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.</li></ol>

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Belum ada pengaturan minuman beralkohol secara spesifik dalam suatu undang-undang.</b></li><li>2. <b>Tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</b></li><li>3. <b>Terdapat usulan untuk menghilangkan kata "Larangan" didalam judul RUU.</b></li></ol>
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh.</b></li><li>2. <b>Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh.</b></li><li>3. <b>Perubahan ketentuan tentang tambahan dana bagi hasil minyak dan gas.</b></li></ol>

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RUU MD3 merupakan RUU penggantian hal ini sesuai dengan Lampiran II angka 237 dan 238 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan kualitas data</li><li>2. Penguatan Satu Data Indonesia (SDI)</li><li>3. Keterpaduan dan kapasitas penyelenggaraan kegiatan statistik</li></ol>

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU tentang Penyiaran sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</li><li>2. RUU Penyiaran merupakan RUU Penggantian dikarenakan 2 hal yaitu (a) sistem Penyiaran di Indonesia telah bermigrasi dari Sistem Penyiaran Analog menjadi Sistem Penyiaran Digital (amanat Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan (b) hal ini mengubah lebih dr 50 % pengaturan penyiaran dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.</li><li>3. Pengaturan Platform Digital Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.</li><li>4. Penyesuaian pengaturan Lembaga Penyiaran dengan UU No. 11 Thn 2020 tentang Cipta Kerja.</li><li>5. Memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia selaku Regulator Penyiaran.</li><li>6. Penguatan kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik.</li></ol>

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1482 457 3205 739">1. Pengembangan pariwisata wajib mempertahankan kekayaan budaya dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, serta memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan.</li><li data-bbox="1482 757 3205 964">2. Perlu kebijakan afirmatif terhadap pengembangan wisata sejarah sebagai pintu masuk untuk memulihkan/mewariskan ke generasi selanjutnya, dan pengembangan wisata religi.</li><li data-bbox="1482 983 3205 1245">3. RUU tentang Kepariwisataan perlu mengembangkan paradigma terkait keseimbangan antara keterlibatan UMKM dengan pertumbuhan investasi, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi.</li><li data-bbox="1482 1264 3205 1470">4. Destinasi wisata belum dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sekitar.</li><li data-bbox="1482 1489 3205 1602">5. Belum adanya kejelasan hubungan antar-Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata antardaerah.</li></ol>

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Kabupaten Parigi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Perubahan nama Kabupaten Parigi Moutong setelah pemekaran menjadi Kabupaten Parigi.</b></li><li>2. <b>Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu kota</b></li><li>3. <b>Kewenangan, Pemerintahan dan Keuangan Daerah</b></li><li>4. <b>Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi.</b></li></ol>
8. 9.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota;</b></li><li>2. <b>Urusan pemerintahan daerah;</b></li><li>3. <b>Penyerahan personel, aset, dan dokumen dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong;</b></li><li>4. <b>Pendapatan, alokasi transfer ke daerah; dan</b></li><li>5. <b>Jumlah bantuan dana dan dana hibah dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong.</b></li></ol>

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Telah selesai dilakukan penyusunan di AKD dan akan dilakukan harmonisasi di Baleg)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterlibatan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam penanganan kesejahteraan lanjut usia.</li><li>2. Penanganan pada lansia tidak dititikberatkan pada bidang ekonomi saja tetapi melalui peningkatan pemberdayaan.</li><li>3. Adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait penanganan lansia.</li><li>4. Aspek perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial bagi lansia.</li><li>5. Batasan usia pada lansia.</li></ol>
11.	RUU tentang Penyadapan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai definisi penyadapan.</li><li>2. Ruang lingkup penyadapan dalam rangka penegakan hukum.</li><li>3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penyadapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme.</li><li>4. Mekanisme penyadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak.</li><li>5. Jangka waktu penyadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penyadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penyadapan dilakukan.</li></ol>

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
12.	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjanjian baku yang diterapkan saat ini berdampak pada kurangnya perlindungan bagi konsumen sehingga perlu diakomodir dalam RUU ini dalam bentuk pengaturan dan keberlakuan dari perjanjian baku tersebut dan pengaturan kondisi tertentu perjanjian baku dapat diberlakukan.</li><li>2. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal terjadinya sengketa perlindungan konsumen perlu diperluas karena pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat jika terjadi sengketa yang diakibatkan dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.</li><li>3. Perlu dibentuk proses penyelesaian sengketa yang mempermudah pihak konsumen, karena pada umumnya pihak konsumen tidak memiliki sumber daya yang cukup dibandingkan pelaku usaha jika terjadi sengketa. Selain itu juga perlu diakomodasi proses penyelesaian sengketa dalam jaringan dalam penyelesaian sengketa.</li><li>4. Permasalahan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang perlu diperkuat dan diperluas dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.</li><li>5. Permasalahan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang perlu diperkuat dan diperluas dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.</li></ol>

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
13.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tompotika	<p>Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika dan DOB Kabupaten Batui Toili merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Secara Geografis DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota Kabupaten (Kabupaten Banggai), sehingga menimbulkan kekhawatiran dan menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Kondisi ini juga menghambat upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan. Keinginan untuk melakukan pemekaran terhadap dua wilayah tersebut bertujuan agar rentang kendali dapat lebih dijangkau. Dari segi kesiapan daerah, kecamatan-kecamatan yang ada dan tergabung dalam DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili telah berupaya lama untuk memperjuangkan pemekaran demi meraih kesejahteraan. Namun demikian, dorongan kuat tersebut hadir kembali saat ini mengingat belum lama ini pemekaran-pemekaran daerah terutama di wilayah Papua telah terwujud.</p>
14.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Batui Toili	

# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat status Rekomendasi atau keputusan Ombudsman agar dipatuhi oleh instansi pelayanan publik.</li><li>2. Memperkuat status sumber daya manusia (SDM) di Ombudsman. Ombudsman terdiri dari Anggota Ombudsman dan Pegawai Ombudsman. Anggota Ombudsman akan diberikan status sebagai pejabat negara beserta fasilitas yang menyertainya. Sementara itu, Asisten Ombudsman dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>3. Dapat membentuk Ombudsman di kabupaten/kota. Akan tetapi, pembentukan ini harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.</li></ol>

# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai badan pengelola BUMN.</li><li>2. Penyertaan modal negara.</li><li>3. Pelaksanaan <i>business judgement rules</i>.</li><li>4. Pengaturan saham hak istimewa.</li><li>5. Penugasan khusus BUMN.</li></ol>
2.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan obat dan makanan oleh institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat.</li><li>2. Pengaturan mengenai penerapan teknologi pengujian laboratorium sesuai perkembangan terkini.</li><li>3. Persyaratan bagi pelaku usaha terhadap obat dan makanan yang akan masuk ekspor dan impor di wilayah Republik Indonesia.</li><li>4. Perlunya pengaturan yang holistik termasuk kelembagaan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan.</li><li>5. Diperlukan penyesuaian pengertian tentang jamu, obat herbal, obat, dan obat tradisional.</li></ol>

# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Provinsi Papua	<p>Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau <i>hybrid</i>).</p>
4.	RUU tentang Provinsi Papua Barat	
5.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara (telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	

# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Kabupaten Batanghari	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
7.	RUU tentang Kota Jambi	
8.	RUU tentang Kabupaten Merangin	
9.	RUU tentang Kabupaten Kerinci	
10.	RUU tentang Kota Pekanbaru	
11.	RUU tentang Kabupaten Bengkalis	
12.	RUU tentang Kabupaten Kampar	
13.	RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu	
14.	RUU tentang Kabupaten Bintan	

# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
15.	RUU tentang Kabupaten Batanghari	<p data-bbox="1712 938 3212 1121">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
16.	RUU tentang Kota Jambi	
17.	RUU tentang Kabupaten Merangin	
18.	RUU tentang Kabupaten Kerinci	
19.	RUU tentang Kota Pekanbaru	
20.	RUU tentang Kabupaten Bengkalis	
21.	RUU tentang Kabupaten Kampar	
22.	RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu	
23.	RUU tentang Kabupaten Bintan	

# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
24.	RUU tentang Kabupaten Pasaman	<p data-bbox="1715 947 3215 1134">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
25.	RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota	
26.	RUU tentang Kota Payakumbuh	
27.	RUU tentang Kabupaten Agam	
28.	RUU tentang Kota Bukit Tinggi	
29.	RUU tentang Kota Padang Panjang	
30.	RUU tentang Kabupaten Tanah Datar	
31.	RUU tentang Kabupaten Sijunjung	
32.	RUU tentang Kota Sawah Lunto	

# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
33.	RUU tentang Kota Solok	
34.	RUU tentang Kabupaten Solok	
35.	RUU tentang Kota Padang	
36.	RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman	
37.	RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan	
38.	RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan	
39.	RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah	
40.	RUU tentang Kabupaten Lampung Utara	

Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini

# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
41.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsep penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.</li><li>2. Kelembagaan pengusahaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.</li><li>3. Pengaturan wilayah kerja dan partisipasi <i>interest</i> 10% kepada BUMD.</li><li>4. Pengaturan pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi (<i>cost recovery</i>).</li><li>5. Pengaturan kegiatan usaha hilir.</li><li>6. Kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi.</li><li>7. Dana minyak dan gas bumi.</li></ol>

# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pekerjaan sebagai PRT belum memiliki pengaturan seperti pekerja formal lainnya.</li><li>2. Belum adanya standar kerja bagi PRT.</li><li>3. Perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan.</li><li>4. Perlindungan PRT dalam penyelesaian perselisihan hukum.</li></ol>

# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masa jabatan kepala desa yang ada di UU Desa saat ini dirasa kurang memadai dalam pelaksanaan tugas kepala desa.</li><li>2. Kewenangan desa dalam hal hak asal-usul dan hak tradisional kurang berkembang.</li><li>3. Kelembagaan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai kurang efektif terutama dalam hal pendanaan.</li><li>4. Banyaknya kasus korupsi yang menimpa perangkat desa serta pengangkatan perangkat desa mengabaikan kompetensi, tradisi dan adat istiadat desa.</li><li>5. Belum adanya pengaturan dana alokasi khusus desa.</li><li>6. UU tentang Desa sekarang tidak mengatur soal lembaga hakim perdamaian desa. Padahal kehadiran lembaga tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir perkara di pengadilan serta menghidupkan tradisi penyelesaian secara adat setempat.</li></ol>

# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Kota Banda Aceh	<b>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</b>
4.	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar	
5.	RUU tentang Kabupaten Pidie	
6.	RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah	
7.	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur	

# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara	<b>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</b>
9.	RUU tentang Kabupaten Aceh Barat	
10.	RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan	
11.	RUU tentang Kota Pangkal Pinang	
12.	RUU tentang Kabupaten Bangka	

# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
13.	RUU tentang Kabupaten Belitung	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
14.	RUU tentang Kota Binjai	
15.	RUU tentang Kabupaten Karo	
16.	RUU tentang Kabupaten Langkat	
17.	RUU tentang Kota Medan	
18.	RUU tentang Kota Tebing Tinggi	

# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
19.	RUU tentang Kabupaten Deli Serdang	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
20.	RUU tentang Kota Tanjung Balai	
21.	RUU tentang Kabupaten Asahan	
22.	RUU tentang Kabupaten Labuhan Batu	
23.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara	

# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
24.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
25.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan	
26.	RUU tentang Kota Pematangsiantar	
27.	RUU tentang Kabupaten Simalungun	
28.	RUU tentang Kota Sibolga	
29.	RUU tentang Kabupaten Nias	



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

# **TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT I & TINGKAT II**

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan syarat usia minimal hakim MK.</li><li>2. Penggantian Keanggotaan Mahkamah Kehormatan MK dari unsur KY sesuai putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.</li><li>3. Pengaturan evaluasi terhadap hakim konstitusi.</li><li>4. Menghapus ketentuan Pasal 87 ttg ketentuan peralihan sesuai dengan Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020.</li></ol>
2.	RUU tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir ( <i>Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons</i> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pemanfaatan pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir.</li><li>2. Sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup dan arah pengaturan dari pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir.</li><li>3. Dampak filosofis, sosiologis dan yuridis serta dampak anggaran untuk merealisasikan ratifikasi mengenai pelarangan senjata nuklir.</li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembaruan regulasi baru di bidang Pendidikan Kedokteran, untuk transformasi sistem pendidikan kedokteran (dokter, dokter spesialis, dan dokter sub-spesialis) serta sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dalam menghadapi sistem pelayanan kesehatan pada era digital 4.0 dan era normal baru.</li><li>2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi dokter sebagai <i>exit exam</i> agar lulusan sarjana kedokteran masih ada yang bertanggung jawab untuk membina sebelum dibolehkan untuk melakukan praktik dokter.</li><li>3. Meningkatnya biaya pendidikan tinggi pada pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran lanjutan.</li><li>4. Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran belum diatur secara spesifik dan komprehensif, termasuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran dengan aplikasi format pendidikan digital.</li><li>5. Pemerintah berpandangan perlu ada pengintegrasian UU Pendidikan Kedokteran dengan UU Praktik Kedokteran dan RUU Sisdiknas.</li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dalam pembahasan RUU tentang Narkotika, Pemerintah mengusulkan untuk menggabungkan materi pengaturan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam RUU tentang Narkotika.

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai transisi dan peta jalan dalam kaitannya dengan transisi energi dari energi tak terbarukan ke Energi Baru dan Energi Terbarukan serta dalam kaitannya dengan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan;</li><li>2. Pengaturan mengenai Energi Baru dan materi tentang ketenaganukliran termasuk di dalamnya mengatur mengenai majelis tenaga nuklir dan badan pengawas tenaga nuklir;</li><li>3. Pengaturan mengenai Energi Terbarukan meliputi perizinan, pengusahaan, penyediaan, dan pemanfaatan;</li><li>4. Pengaturan mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan, harga, insentif, serta dana Energi Baru dan Energi Terbarukan.</li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan.</li><li>2. Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita.</li><li>3. Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak.</li><li>4. Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.</li></ol>
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE);</li><li>2. Partisipasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi;</li><li>3. Pendanaan dalam penyelenggaraan KSDAHE; dan</li><li>4. Pemberatan sanksi pidana dan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).</li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Negara harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak sebagai perwujudan pelaksanaan hak untuk hidup dan berkehidupan.</li><li>2. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi yang diakibatkan oleh berbagai faktor, oleh karena itu perlu penanganan segera guna meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup ibu dan anak.</li><li>3. Masih banyaknya program Pemerintah terkait kesejahteraan ibu dan anak yang belum terlaksana secara merata di berbagai daerah.</li><li>4. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh ibu dan anak.</li><li>5. Belum diaturnya kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif dalam suatu undang-undang menyebabkan program yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat masih banyak dilakukan secara parsial, sporadis, dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.</li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerangka berpikir dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak hanya mengatur mengenai ketentuan hukum pidana tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum perdata dan administratifnya. Pendekatan dalam UU ITE pun diharapkan bersifat holistik tidak hanya mengedepankan sanksi.</li><li>2. Revisi UU tentang ITE diharapkan dapat mengakomodir semua hal terkait <i>cyber security</i> dan memperhatikan pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual yang diatur secara internasional dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia.</li><li>3. Batasan mengenai penyadapan dalam revisi UU tentang ITE agar dapat diperjelas dan dipertegas.</li><li>4. Teknologi dalam UU tentang ITE perlu diatur mengenai utilitasnya, disamping mengatur mengenai kewajiban.</li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	<b>RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama;</b></li><li><b>2. Pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan;</b></li><li><b>3. Pendidikan, pelatihan, dan latihan militer;</b></li><li><b>4. Kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Dirgantara;</b></li><li><b>5. Kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik;</b></li><li><b>6. Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis; dan</b></li><li><b>7. Bidang lain dari kerja sama militer yang akan disetujui oleh Para Pihak.</b></li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
11.	<b>RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (<i>International Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearance</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Materi muatan adalah tentang pelindungan terhadap HAM.</li><li>2. Konvensi ini menganut asas hukum non-retroaktif (tidak berlaku surut/<i>lex temporis delicti</i>)</li><li>3. Indonesia melakukan deklarasi untuk memperjelas posisi Indonesia terkait penyelesaian penghilangan paksa.</li><li>4. Ruang lingkup dalam RUU ini meliputi; definisi penghilangan paksa, serta kewajiban negara pihak atas konvensi penghilangan paksa setelah berlaku di negara tersebut.</li><li>5. Implikasi atas ratifikasi konvensi penghilangan paksa yaitu; dapat menyelesaikan kasus melalui proses hukum yang adil jika terjadi di masa mendatang; menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilaksanakan; menentukan standar minimum dan maksimum hukuman menurut sudut pandang Indonesia; terjaminnya perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelapor; dan terjaminnya hak korban beserta keluarganya.</li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 1 Tahun 2023)
2.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 2 Tahun 2023)
3.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 3 Tahun 2023)

# PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
4.	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Desember 2022 (UU Nomor 4 Tahun 2023)
5.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan ( <i>Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives</i> )	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Desember 2022 (UU Nomor 5 Tahun 2023)

# PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
6.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Disetujui dalam Rapat Paripurna 21 Maret 2023 (UU Nomor 6 Tahun 2023)
7.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 7 Tahun 2023)

# PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
8.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 8 Tahun 2023)
9.	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 9 Tahun 2023)
10.	RUU tentang Provinsi Jawa Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 10 Tahun 2023)
11.	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 11 Tahun 2023)

# PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
12.	RUU tentang Provinsi Jawa Timur	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 12 Tahun 2023)
13.	RUU tentang Provinsi Maluku	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 13 Tahun 2023)
14.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 14 Tahun 2023)
15.	RUU tentang Provinsi Bali	Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 15 Tahun 2023)

# PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Disetujui dalam Rapat Paripurna 13 April 2023 (UU Nomor 16 Tahun 2023)
17.	RUU tentang Kesehatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 11 Juli 2023 (UU Nomor 17 Tahun 2023)
18.	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	Disetujui dalam Rapat Paripurna 16 Oktober 2023 (UU Nomor 19 Tahun 2023)
19.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 3 Oktober 2023 (UU Nomor 20 Tahun 2023)

# PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 3 Oktober 2023 (UU Nomor 21 Tahun 2023)